

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus. *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumintaran, 2008.
- Allen, Michael J. *Criminal Law*. Oxford: University Press, 2003.
- Amrullah, Arif. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Anwar, H.A.K. Moch. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Arif, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- . *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang; Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.
- B. Clinard, Marshall dan Peter C. Yeager. *Corporate Crime*. London: Collier Macmillan Publishers, 1983.
- Bintliff, Russell L. *Complete Manual of White Collar Crime Detection and Prevention*. New Jersey: Prentice Hall, 1997.
- Brickey, Kathleen F. *Corporation and White Collar Crime Cases and Material*. Boston: Little Brown and Company, 1995.
- Cook, Joseph G and Paul Marws. *Case Book Series of Criminal Law*. St Fransisco, Mattew Bender, 2000.
- D. Cox, James, Thomas Lee Hazen dan F. Hodge O'Neal. *Corporations*. Boston: Aspen Law & Bisnisin, 1997.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Prenhalindo, 2001.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: PT Setio Acness, 2001.
- Davies, Paul L. *Principles of Modern Company Law*. London: Sweet and Maxwell, 1997.
- Emanuel, Steven L. *Emanuel Law Outline Criminal Procedur*. New York: Aspem Publisher, 2005.

- Finch, Emily dan Stefan Fafinski. *Criminal Law*. Edinburg: Pearson Education Limited, 2007.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- , *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Hukum Perseroan Terbatas dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Goldenberg, Philip. *Guide to Company Law*. Chicago: Commerce Clearing House, 1993.
- Goulding, Simon. *Corporation Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 1996.
- Halim, A. Ridwan. *Hukum Dagang dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Hamilton, Robert W. *The Law of Corporation in a Nutshell*. Texas: West Group, 2000.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- , *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidna Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerpan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*.
- Hasibuan, Albert. *Ed. Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum*. Bandung: Alumni, 1985.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Koh, KL, CMV Clarkson dan NA Morgan. *Criminal Law in Singapore and Malaysia Text and Materials*. Kuala Lumpur: Malayan Law Jurnal, 1989.

- Loqman, Loebby. *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: UPT Penerbit, 1995.
- Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Prints, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Priyanto, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono. “Kolusi di Dalam Dunia Bisnis: Praktek, Bentuk dan Usaha Penanggulangannya (Beberapa Catatan Sementara).” Dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hal. 116-124.
- . “Pengaruh Pemikiran Kriminologi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Penghantar untuk Diskusi).” Dalam *Pembaruan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat*. (akarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hal. 37-52.
- . “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi.” Dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hal. 64-73.
- . “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia.” Dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hal. 96-115.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-*

- Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Rafika Aditama, 2002.
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Perbuatan Melawan hukum*. Jakarta: CV. Rizkita, 2001.
- . *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002.
- . *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2006
- . *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2006.
- Seno Adji, Oemar. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta; Erlangga, 1981.
- . *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- . *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Simandjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1981.
- Simester, A.P dan W.J Brookebanks. *Principles of Criminal Law*. Welington: Brookess A Thomson Company, 2000.
- Simon, David R dan D. Stanley Eitzen. *Elite Deviance*. Boston: Ally and Bacon Inc, 1986.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafitipers, 2006.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soesilo, R. *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya-Jawab)*. Bogor: Politeia, 1981.

- Stuart, George Moody. *Grand Corruption How Business Bribes Damage Developing Countries*. Oxford: World View Publishing, 1997.
- Suhardana, F.X. *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2001.
- Surya, Indra dan Ivan Yusiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana dan LKPMK Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. New York: The Dyden Press, 1942.
- Usman, Rachmadi. *Dimesnsi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.
- Van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum [Ons Strafrecht I Het materiele strafrecht algemeen deel]*. Diterjemahkan oleh Hasan. Bandung: Binacipta, 1984.
- Widjaja, Gunawan. *Transplantasi Trusts dalam KUHPerdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pres, 2008.
- Woon, Walter. *Company Law*. Selangor: Sweet and Maxwell Asia, 2000.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

## **Makalah**

- Mukantardjo, Rudy Satriyo. "Mahkamah Konstitusi dan Terorisme Mahkamah Konstitusi dan Korupsi Mahkamah Konstitusi dan lain-lainnya." Makalah disampaikan pada Diskusi Mengkritisi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945, Depok, 19 September 2006.
- Tumbuan, Fred B.G.. "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007." Disampaikan dalam Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga, Bogor 3-13 Maret 2008.
- ". "Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Udaahan Tunggal dan Sebagai Anggota Grup." Makalah disampaikan pada kuliah hukum perusahaan dan kepailitan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 16 September 2009.

## **Tesis**

Prabowo, Riyanto. “*Prinsip Kemandirian Perseroan Terbatas Dikaitkan dengan Peran dan Kedudukan Holding Company.*” Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Putri, Theodora Yuni Shah. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat.” Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

## **Disertasi**

Fitriasih, Surastini. “Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Pidana (Studi terhadap Putusan Pengadilan).” Disertasi, Progran Doktorat Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

## **Artikel Ilmiah**

Hefendehl, Roland. “Corporate Criminal Responsibility: Model Penal Code Section 2.07 and the Development in Western Legal System.” *Buffalo Criminal Law Review Volume 4* (1 September 2001): 283-300.

Lederman, Eli. “Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity.” *Buffalo Criminal Law Rivew Vol. 4* (1 Oktober 2001): 641-708.

Reksodiputro, Mardjono. “Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru.” *Indonesian Jurnal of Internasional Law Volume 1* (4 Juli 2004): 693-708.

Van Den Heuvel, Grat. “The Parliamentary Enquiry on Fraud in the Dutch Construction Industry Collusion as Concept between Coruption and State-Coeporate Crime.” *Crime, Law & Social Change Ed. 44* (2005). 133-151.

## **Modul Pelatihan**

Seminar *Internasioanl Issues in asset forfeiture* yang diselenggarakan oleh *office of legal education executive office for unite state attorneys and asset forfeiture and money laundering section criminal division Columbia, South Carolina* tanggal 9 sampai dengan 11 April 2008.

## Artikel Majalah

Baskoro, L.R, Ramidi, Rini Kustiani dan Agus Suprinato. "Laporan Utama Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum Kini Giliran Yusril." *Tempo* (Edisi 24-30 November 2008): 111.

Handayani, Anne L. Rini Kustiani dan Munawwaroh. "Laporan Utama Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum: PT Saran Reka Mesin Duit." *Tempo* (24-30 November 2008): 116.

Ramidi. "Laporan Utama Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum Sekandal dari Kuningan." *Tempo* (24-30 November 2008): 112.

Rini Kustiani dan Ramidi. "Yusril Ihza Mahendra: Mana Mungkin Menteri Ambil Keputusan Sekoyong-koyong." *Tempo* (24-30 November 2008): 114-115.

## Kamus

Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesian Dictionary*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Ed. 7. St. Paul: West Group, 1999.

Gifis, Steven H. *Law Dictionary. Third Edition*. New York: Barron's Educational Series Inc., 1985.

Manser, H. Martin. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. London: Oxford University Perss, 2001.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

## Internet

Clarkson, C.M.V. "Corporate Culpability," <<http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/clarkson2.html#Heading9>> diunduh tanggal 15 September 2009.

"Board of Commissioners PT Bhakti Investama Tbk." <[http://www.bhakti-investama.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6&Itemid=21](http://www.bhakti-investama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=21)> diunduh tanggal 15 Juli 2009

- “Company Overreview.” <[http://www.bhakti-investama.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1&Itemid=15](http://www.bhakti-investama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=15)> diunduh tanggal 19 November 2009.
- “Dana Sisminbakum Masuk Negara.” <<http://www.legalitas.org/?q=content/dana-sisminbakum-masuk-negara>> diunduh tanggal 11 November 2009.
- “Group Strukture PT Bhakti Investama Tbk.” <[http://www.bhakti-investama.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=4&Itemid=19](http://www.bhakti-investama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=19)> diunduh tanggal 12 Oktober 2009
- “Kasus Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup An Terdakwa RICHARD BRUCE NESS DKK.” dalam <[http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=23&idsu=11&idke=0&hal=10&id=546](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=23&idsu=11&idke=0&hal=10&id=546)> diunduh 9 Desember 2009.
- “Nilai tambah Sistem Admininistrasi Badan Hukum.” <<http://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1c.php>> diunduh pada 14 Oktober 2009.
- “Putusan Sidang Kasus Buyat ; AS sambut gembira putusan PN Manado” dalam <[http://www.lestari-m3.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=51&Itemid=45](http://www.lestari-m3.org/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=45)> diunduh 9 Desember 2009.
- “*Special Purpose Vehicle* (SPV): Layakkah ia hidup di Indonesia?” <[http://74.125.153.132/search?q=cache:-iG1aL2uoMJ:www.the-celi.com/index.php%3Foption%3Dcom\\_docman%26task%3Ddoc\\_download%26gid%3D43%26Itemid%3D26+fungsi+special+purpuse+vechel&cd=1&hl=id&ct=clnk&client=opera](http://74.125.153.132/search?q=cache:-iG1aL2uoMJ:www.the-celi.com/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D43%26Itemid%3D26+fungsi+special+purpuse+vechel&cd=1&hl=id&ct=clnk&client=opera)> diuntuh 21 November 2009.
- “Susunan Management PT Bhakti Asset Management.” <<http://www.reksadanabig.com./index.php?modName=aboutus&todo=detail&id=466&sisid=cc07ebd76786aa4eb7e8e1ad6799f4a2&PHPSESSID=d0218759c101c55c775ad30b961bfa66>> diunduh 13 November 2009.

## Undang-Undang

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosoebio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana [Wetboek vsn Strafrecht voor Nederlandsch Indie]*. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1996.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.



- . *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi*. UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955.
- . *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 3. LN Nomor 19 Tahun 1971, TLN Nomor 2958.
- . *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209.
- . *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 5, LN 77 Tahun 1986, LTN Nomor 3344.
- . *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 1, LN Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587.
- . *Undang-Undang tentang Pasar Modal*. UU Nomor 8, LN Nomor 64 Tahun 1995, TLN Nomor 3608.
- . *Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. UU Nomor 20, LN Nomor 43 Tahun 1997, TLN Nomor 3687.
- . *Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme*. UU Nomor 28 LN Nomor 73 Tahun 1999, TLN Nomor 3849.
- . *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 31, LN Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874.
- . *Undang-Undang tentang Yayasan*. UU Nomor 16, LN Nomor 112 Tahun 2001, TLN Nomor 4123.
- . *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 20, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.
- . *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU Nomor 15, LN Nomor 30 Tahun 2002, TLN Nomor 4191.
- . *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU Nomor 25, LN Nomor 108 Tahun 2003, TLN Nomor 4324.
- . *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 9, LN Nomor 35 Tahun 2004, TLN Nomor 4380.
- . *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU Nomor 16, LN Nomor 67 Tahun 2004, TLN Nomor 4401.

----- . *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756.

----- . *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. UU Nomor 28, LN Nomor 115 Tahun 2008, TLN Nomor 4430.

## **Peraturan Pemerintah**

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak*. PP Nomor 22, LN Nomor 57 Tahun 1997, TLN Nomor 3694.

----- . *Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman*. PP Nomor 26, LN Nomor 58, Tahun 1999, TLN Nomor 3837.

----- . *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman*. PP Nomor 87, LN Nomor 171 Tahun 2000, TLN Nomor 4006.

----- . *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman*. PP Nomor 50, LN Nomor 74 Tahun 2001, LN Nomor 4104.

----- . *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman*. PP Nomor 4 Tahun 2004.

----- . *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*. PP Nomor 75, LN Nomor 161 Tahun 2005.

----- . *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM*. PP Nomor 82, LN Nomor 171 Tahun 2007, TLN Nomor 4799.

----- . *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*. PP Nomor 19, LN Nomor 38 Tahun 2007, TLN Nomor 4705.

------. *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*. PP Nomor 38, LN Nomor 77, Tahun 2009, TLN Nomor 5008.

### **Keputusan Presiden**

Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur*. Keppres Nomor 7 Tahun 1998.

------. *Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*. Keppres Nomor 18, LN Nomor 15 Tahun 2000.

### **Rancangan Undang-Undang**

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2009.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

### **Putusan Pengadilan Negeri**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 11 September 2009 atas nama Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waoruntu.